

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madrasah merupakan sebuah aktifitas besar yang di dalamnya ada empat komponen yang saling berkaitan. Empat komponen yang dimaksud adalah Staf Tata Laksana Administrasi, Staf Teknis Pendidikan, didalamnya ada Kepala Madrasah dan Guru, Komite Madrasah sebagai badan independent yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa ditempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan operasi Madrasah terbentuknya dari hubungan “*simbiosis mutualis*” keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal.

Madrasah juga merupakan lembaga pendidikan formal yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan, kecakapan ketrampilan dan sikap-sikap dasar yang diperlukan untuk pembentukan dan pengembangan pribadi yang utuh. Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan lokal, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, seluruh komponen pendidikan di Madrasah harus berusaha meningkatkan diri guna mendukung kemajuan pendidikan itu sendiri.

Pendidikan merupakan arahan bagi manusia agar tumbuh sesuai dengan apa yang ada pada diri dan lingkungannya untuk menjadi jati diri yang hakiki. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan dan diselenggarakan berdasarkan perkembangan dan potensi yang ada pada peserta didik. Potensi peserta didik harus dibina secara berjenjang dan berkelanjutan seperti yang dijelaskan pada BAB VI Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa jalur pendidikan terbagi atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Bersumber pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 kemudian muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya dilakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 disebutkan lingkup standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Salah satu standar tersebut adalah standar sarana dan prasarana yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sebagai upaya yang berkelanjutan dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Peraturan menteri tersebut menjelaskan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dimiliki oleh madrasah. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di madrasah¹. Berkaitan dengan ini, pengertian prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di madrasah.

¹Barnawi & M. Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, (Yogyakarta: Ruzz Media, 2012), 47

Penekanan pada pengertian tersebut adalah pada sifatnya, sarana bersifat langsung dan prasarana tidak bersifat langsung dalam menunjang proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan perlu manajemen yang baik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Definisi manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (P3) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam arti sempit adalah manajemen madrasah, pengawas/evaluasi, dan sistem informasi madrasah².

Manajemen madrasah atau lembaga pendidikan termasuk dalam lingkup manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan memiliki beberapa obyek garapan dengan titik tolak pada kegiatan belajar-mengajar di kelas, maka sekurang-kurangnya ada delapan obyek garapan, yaitu: 1) manajemen peserta didik, 2) manajemen personalia madrasah, 3) manajemen kurikulum, 4) manajemen sarana atau material, 5) manajemen tatalaksana pendidikan atau ketatausahaan madrasah, 6) manajemen pembiayaan atau anggaran, 7) manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan, dan 8) manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. Kedelapan obyek garapan tersebut menjadikan peneliti lebih fokus terhadap manajemen sarana dan prasarana pendidikan³.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu aktivitas menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan berbagai macam properti pendidikan yang dimiliki oleh suatu institusi pendidikan⁴. Manajemen sarana dan prasarana diharapkan dapat membantu madrasah/sekolah dalam merencanakan kebutuhan fasilitas, mengelola pengadaan fasilitas, mengelola pemeliharaan fasilitas,

² Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 6

³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, 2008), 6

⁴ A.L. Hartani, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Presindo, 2011), 136

mengelola kegiatan inventaris sarana dan prasarana, serta mengelola kegiatan penghapusan barang inventaris madrasah⁵.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu wacana penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, masih perlu banyaknya upaya-upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Usaha untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan diawali dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran yang ada pada semua jenjang pendidikan, karena proses pembelajaran ini merupakan kegiatan utama di suatu madrasah. Empat faktor penting yang harus ada dalam proses ini yaitu guru, peserta didik, kurikulum, dan bahan pelajaran. Keempat faktor tersebut akan membuat proses pembelajaran dapat terlaksana dengan nyaman dan kondusif, kualitas proses pembelajaran tersebut dapat ditingkatkan lagi apabila terdapat penunjang yang lebih baik, yaitu mengenai faktor sarana dan prasarana.

Pembelajaran di madrasah akan berjalan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan jika keempat faktor yang disebutkan di atas dapat saling menyesuaikan dan dimaksimalkan dengan adanya sarana dan prasarana yang terkelola.

Sarana dan prasarana sebagai salah satu komponen penunjang proses pembelajaran merupakan alat yang sering digunakan guru untuk merealisasikan tujuan pembelajaran tersebut, hal ini juga bukan saja memberi pengalaman konkret tapi juga membantu peserta didik dalam mengintegrasikan pengalaman yang terdahulu⁶. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran, antara lain gedung, ruang belajar, meja, kursi serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, antara lain halaman, kebun, taman madrasah, jalan menuju madrasah.

⁵ Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah* (Jakarta, 2007), 3

⁶ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 49

Karena sarana dan prasarana pendidikan dapat memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran, maka sarana dan prasarana yang sudah ada harus bisa dioptimalkan penggunaannya.

Peraturan Pemerintah No: 19 Tahun 2005 pada bab VII pasal 42 ayat 2 mencantumkan bahwa: Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ketentuan ini juga tercantum dalam lampiran peraturan menteri pendidikan nasional nomor 24 tahun 2007 tanggal 28 juni tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) meliputi standar satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, serta kelengkapan sarana dan prasarana yang mencakup ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolah raga.

Sebuah lembaga pendidikan harus menyadari bahwa keberhasilan proses pembelajaran di madrasah sangat dipengaruhi tersedia tidaknya kelengkapan sarana pendidikan. Peningkatan pendidikan akan sulit dilaksanakan jika sarana yang ada kurang lengkap atau ada tetapi kurang terkelola. Seorang pendidik pun kadang kurang mengoptimalkan sarana yang ada dalam proses pembelajaran karena faktor pemborosan waktu, tenaga, bahkan tidak sedikit juga kurang paham cara penggunaan sarana yang ada. Akhir-akhir ini masih sering ditemukan banyak sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh madrasah yang diterima sebagai bantuan, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang tidak optimal penggunaannya dan bahkan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya.

Keadaan seperti itu disebabkan antara lain oleh kurangnya kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pengelolaan yang memadai. Seiring dengan perubahan pola pemerintahan setelah diberlakukannya

otonomi daerah, maka pola manajemen madrasah saat ini berbeda pula dengan sebelumnya, yakni lebih bernuansa otonomi dimana madrasah diberi wewenang sendiri dari pemerintah untuk mengelola semua yang berkaitan dengan madrasah tersebut. Untuk mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ini diperlukan penyesuaian manajemen sarana dan prasarana madrasah.

Madrasah dituntut memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan madrasah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga madrasah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Hal itu terutama ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di madrasah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Berdasarkan data observasi awal di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon mengenai perencanaan masih ada yang bergantung diri dari bantuan pemerintah, sehingga sarana yang diterima kadang kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada, disamping itu karena proses birokrasi dengan instansi yang terkait menyebabkan apa yang seharusnya dibutuhkan pada saat itu bisa terpenuhi dalam selang waktu yang lama atau dengan kata lain kebutuhan itu sudah basi. Kemudian pada aspek pemeliharaan dan pengaturan penggunaan juga masih belum optimal.

Sarana dan prasarana yang ada dilakukan perawatan disaat kegiatan di madrasah tidak terlalu padat, keadaan tersebut dikarenakan keterbatasan pada sumber daya manusia yang ada di madrasah tersebut secara kuantitas maupun kualitas. Kurangnya pengetahuan dari pengguna menyebabkan sarana yang ada digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengalami kerusakan. Mengenai tempat-tempat penyimpanan atau gudang untuk menyimpan sarana dan prasarana tidak ada atau kurang dalam perawatannya, sehingga ada penumpukan sarana dan prasarana yang rusak atau tidak terpakai di tempat-tempat penyimpanan. Bahkan sarana yang masih baik kondisinya karena penyimpanan yang kurang ini menjadi

rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Mengenai penghapusan juga belum dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Kebanyakan dari kasus yang ditemui, proses ini kadang diabaikan karena hanya akan membuang waktu padahal masih banyak yang harus dikerjakan. Paradigma tentang barang rusak merupakan hal yang sudah tidak ada gunanya juga menjadi penyebab proses penghapusan kurang begitu diperhatikan oleh pihak yang terkait.

Peran dan keberadaan Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah bagian sarana prasarana sangatlah penting dalam usaha peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan komponen pendukung untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan kelancaran proses pembelajaran di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon. Pihak-pihak yang langsung berurusan dengan sarana dan prasarana dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola yang diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan administrasi sarana dan prasarana yang ada di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon.

Proses pengadaan sarana prasarana belum menggunakan rangkaian manajemen, gambaran sederhananya apabila terdapat kebutuhan langsung meminta kepada yayasan tanpa mempertimbangkan perencanaan kebutuhan. Hal tersebut akan berdampak buruk apabila terjadi kesalahan atau permasalahan dalam proses pengadaan sarana dan prasarana karena dokumentasi dan prosedurnya belum jelas. Program pemeliharaan sarana dan prasarana belum ada, selain itu dibutuhkan gudang untuk penyimpanan barang karena sering terjadi barang yang tercecer.

Inventarisasi sarana dan prasarana dilakukan dari awal karena seluruh sarana dan prasarana belum diinventarisasi, keterbatasan petugas pengelola sarana prasarana yaitu guru (penanggung jawab sarana prasarana) beserta bendahara mempengaruhi proses inventarisasi yang lebih lama. Kondisi sarana dan prasarana MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon belum sesuai standar nasional dengan berbagai kriteria, sehingga dalam pelaporan sarana prasarana ke Kementerian Agama dan atau ke Dinas Pendidikan mengalami kendala. Banyak barang tidak terpakai yang berada di ruang pegawai seperti monitor rusak, cpu rusak, dan keyboard tidak

terpakai. Dapat dimungkinkan pengelola sarana prasarana di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon belum melakukan manajemen sarana dan prasarana dengan baik.

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil judul penelitian sebagai berikut : MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA MADRASAH (Studi Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon)

B. Rumusan Masalah

Peranan Wakil Kepala Madrasah bidang Sarana dan Prasarana itu banyak ragamnya, diantaranya adalah membantu Kepala Madrasah dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana madrasah. Namun pada pelaksanaannya di lapangan, seringkali ditemui beberapa masalah yang berkaitan dengan manajemen madrasah dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana madrasah. Menurut analisis peneliti, adanya masalah yang berkaitan dengan manajemen madrasah dalam pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain disebabkan oleh :

1. Panitia khusus perencanaan sarana prasarana belum ada sehingga tanggung jawab kerja kurang jelas dan menghambat penyusunan daftar kebutuhan.
2. Proses pengadaan sarana prasarana belum menggunakan rangkaian manajemen, apabila terdapat kebutuhan langsung meminta pada yayasan tanpa mempertimbangkan perencanaan kebutuhan.
3. Program pemeliharaan sarana dan prasarana belum ada, selain itu dibutuhkan gudang untuk penyimpanan barang karena sering terjadi barang yang tercecer di tempat tempat lain.
4. Inventarisasi sarana prasarana terhambat karena petugas pengelola sarana prasarana hanya guru (penanggung jawab sarana prasarana) dan bendahara.
5. Kondisi sarana prasarana MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon tidak sesuai dengan Standar Nasional sehingga mengalami kendala dalam pelaporan ke Kementerian Agama/Dinas Pendidikan.
6. Banyak barang tidak terpakai yang berada di ruang pegawai seperti monitor rusak, CPU rusak, dan keyboard tidak terpakai.

7. Dapat dimungkinkan pengelola sarana prasarana di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon belum melakukan manajemen sarana dan prasarana dengan baik.

Guna meemfokuskan penelitian agar lebih terarah, peneliti membatasi masalah yang menyangkut manajemen Sarana dan Prasarna madrasah yang dilaksanakan di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon. Melalui fungsi manajemen menurut George R. Terry yaitu planning, organizing, actuating dan controlling, akan tetapi pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada perencanaan (planning) dan pelaksanaan (actuating).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon?
2. Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon?
3. Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon?
4. Bagaimana inventarisasi sarana dan prasarana di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon?
5. Bagaimana penghapusan sarana dan prasarana di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya untuk menyajikan suatu deskripsi empiris hasil penelitian. Adapun tujuannya yaitu:

- a. Mendeskripsikan perencanaan sarana dan prasarana di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon.
- b. Mendeskripsikan pengadaan sarana dan prasarana di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon.
- c. Mendeskripsikan pemeliharaan sarana dan prasarana di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon.
- d. Mendeskripsikan inventarisasi sarana dan prasarana di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon.

- e. Mendeskripsikan penghapusan sarana dan prasarana di MA Nasyrul Ulum Kota Cilegon

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat baik kepada penulis sendiri maupun yang membaca tulisan ini. Manfaat yang diharapkan yaitu :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Manajemen Sarana dan Prasarana Madrasah dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pihak Madrasah.
- b. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi para pembaca, pengajar, dan para pihak yang berkecimpung dalam lembaga pendidikan pada umumnya serta bagi penulis khususnya, agar menyadari betapa pentingnya Manajemen Sarana dan Prasarana Madrasah yang baik dalam meningkatkan sarana dan prasarana Madrasah khususnya yang menunjang proses pembelajaran sehingga mutu pendidikan yang berkualitas dapat tercapai.
- c. Secara institusional, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana madrasah melalui peran Kepala Madrasah dan khususnya Wakil Kepala Madrasah bidang Sarana Prasarana.

D. Kajian Pustaka/Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Bustanul Arifin Tahun 2016

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, peneliti telah menemukan tema yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu TESIS yang ditulis oleh Bustanul Arifin yang berjudul: “Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan Jogorogo Ngawi.

Hasil Penelitiannya menunjukkan peran masyarakat yang diwadahi Komite dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai pengambil keputusan, masyarakat diajak musyawarah dalam kegiatan-kegiatan mdrasah, sebagai pelaksana,

masyarakat bergotong royong membantu membangun sarana prasarana gedung ruang kelas, sesuai dengan kesepakatan awal sebelum pelaksanaan pengerjaan, peran sebagai pengambil manfaat, peningkatan jumlah kelulusan dan adanya peningkatan jumlah prosentasi program yang terlaksana, peran sebagai evaluasi, tahap evaluasi yang dilakukan atas keseluruhan program yang dilakukan. Peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai pendukung, adanya bantuan berupa alat-alat keperluan yang harus dimiliki bagi madrasah untuk penyelenggaraan pendidikan, sebagai mediator, masyarakat memberikan pengawasan kepada dewan pendidikan yang ada di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten, tentang pencairan dana yang akan diberikan kepada madrasah. Sebagai pertimbangan, adanya musyawarah dalam membentuk paguyuban walii murid, sebagai pengontrol, pemberian pengawasan dan evaluasi atas program yang telah dilakukan seperti dalam rapat atau saat pelaksanaan program madrasah.

2. Penelitian Diana Sufa Rahmawati tahun 2011

Diana Sufa Rahmawati menulis Tesis dengan judul, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor”. Tesis ini membahas tentang gambaran partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di SD Negeri Cibeusi dan SD Negeri Jatinangor, serta upaya sekolah dalam memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivism dengan pengumpulan data kualitatif, dan jenis peneliian deskriptif.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa adanya partisipasi masyarakat di SD Negeri Cibeusi dalam penyusunan dan pembuatan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan pendidikan berupa dana dan tenaga, sedangkan di SD Negeri Jatinangor berupa tenaga saja. Tingkat partisipasi masyarakat di SD Negeri Cibeusi berada pada level yang tinggi dibandingkan dengan SD Negeri Jatinangor yang berada pada level lebih rendah.

E. Kerangka Berpikir

Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar dalam pencapaian tujuan pendidikan berjalan lancar, teratur, efektif dan efisien. Sarana dan prasarana madrasah akan memberikan manfaat yang optimal kepada para siswa dan guru apabila pengelolaannya baik. Jika pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan baik, maka layanan kepada semua warga madrasah akan meningkat mutunya. Oleh karena itu pengelolaan sarana dan prasarana harus berpedoman kepada acuan yang ada serta masalah–masalah praktis yang dihadapi. Proses pengelolaan sarana dan prasarana madrasah lebih banyak dilakukan oleh pengelola dari tenaga administrasi dibantu dengan Bapak/Ibu guru. Dengan demikian perlu memperhatikan pembagian mengajar dengan tugas sebagai pengelola sarana dan prasarana. Kepala madrasah bertanggung jawab terhadap keberadaan sarana dan prasarana madrasah karena langsung berhubungan dengan proses pembelajaran yang ada di madrasah, sedangkan pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Supaya sarana dan prasarana dapat berfungsi secara optimal, maka perlu dilakukan pengelolaan baik itu pengelolaan gedung maupun perlengkapan yang ada di madrasah.

Pengelolaan merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya (resources) secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal. Aspek dalam pengelolaan sarana dan prasarana meliputi: perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Kepala madrasah dan pengelola dalam mengelola sarana dan prasarana harus memperhatikan aspek perencanaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Kepala madrasah adalah orang yang diberi tanggungjawab mengelola madrasah menghimpun, memanfaatkan, dan menggerakkan seluruh potensi madrasah secara optimal untuk mencapai tujuan⁷. Tugas utama yang diemban oleh kepala madrasah

⁷Syaiful Sagala, *Manajemen strategic Dalam peningkatan Mutu Pendidikan*, (Alfabeta, Bandung: 2013), 88

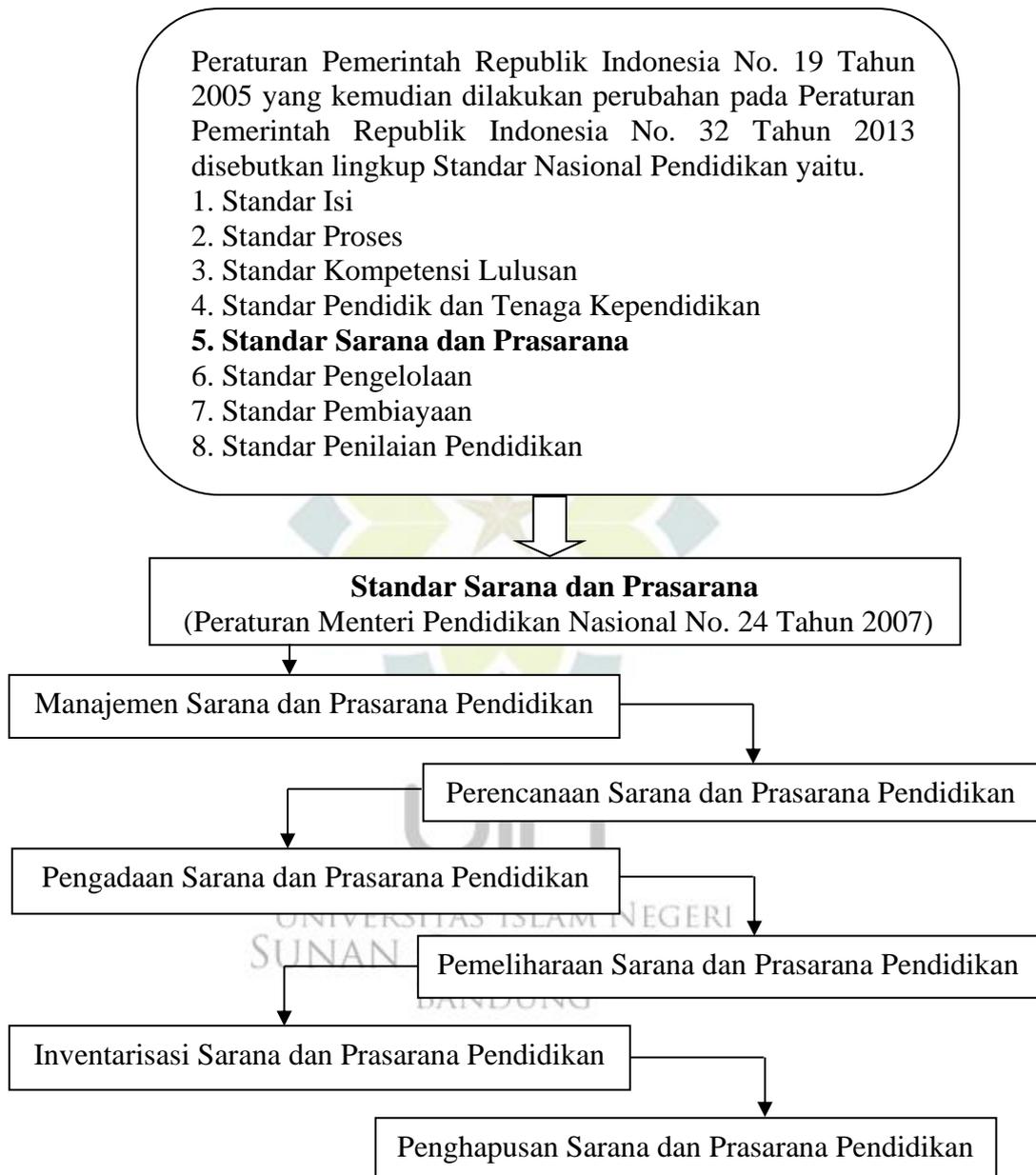
sebagai seorang pemimpin adalah merumuskan berbagai bentuk kebijakan yang berhubungan dengan visi, orientasi dan strategi pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Peranan kepala madrasah sangat penting dalam menyetapkan operasional kerja harian, mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan yang dapat memecahkan berbagai problematika pendidikan di madrasah. Pemecahan berbagai problematika ini sebagai komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui perencanaan yang matang dalam mempersiapkan sarana dan prasarana madrasah dan perbaikan-perbaikan penting guna meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah itu sendiri.

Kegiatan belajar pada setiap madrasah merupakan suatu proses yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kegiatan belajar yang baik ternyata didukung oleh penerapan disiplin madrasah, kinerja guru, keadaan peserta didik, partisipasi warga madrasah, dan tentunya sarana dan prasarana yang memadai. Kepala madrasah memiliki prinsip kepemimpinan yang akan membimbing madrasah menjadi suatu institusi yang berkualitas. Kepala madrasah menyadari akan pentingnya pembelajaran yang akan mendorong pada suatu kemajuan, mempunyai prinsip masa depan, sehingga kepala madrasah dan seluruh personilnya mempunyai visi yang tajam, terlebih dalam pemenuhan sarana dan prasarana madrasah.

Di bawah kepemimpinan kepala madrasah yang memperjuangkan bagaimana agar madrasah ini bisa maju dan bersaing dengan madrasah yang lain, tentu harus mampu memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran, baik itu yang dibutuhkan oleh peserta didik maupun oleh guru sebagai tenaga pendidik, maka fasilitas itu mutlak menjadi sesuatu yang menjadi prioritas, karena kepala madrasah menyadari betul pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Dalam aspek perencanaan pengelola dan Kepala madrasah harus menyusun rencana pengadaan, menyeleksi dan menentukan skala prioritas, pembentukan panitia, dan pelaksanaan pengadaan. Dalam pemeliharaan yang harus diperhatikan adalah pengaturan sarana dan prasarana, inventarisasi, penyimpanan, dan pelaksanaan pemeliharaan. Sedangkan untuk proses penghapusan yang harus diperhatikan pengelola adalah analisis keadaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah.

Berdasarkan pemaparan di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam sekema di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan⁸

Bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian dilakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah

⁸Diolah sendiri oleh Peneliti dengan mengacu kepada PP no 19 Tahun 2005

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 disebutkan bahwa lingkup standar nasional pendidikan meliputi: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Pada penelitian ini lebih difokuskan pada standar sarana dan prasarana pendidikan. Mengacu pada standar sarana dan prasarana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian muncul Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/ MA).

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerja sama pendayagunaan keseluruhan sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi: perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Dengan demikian, jika manajemen sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan baik, maka sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga berjalan secara maksimal. Tahapan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang sangat penting yaitu perencanaan.

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu proses analisis dan menetapkan keputusan yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan bermutu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses perencanaan ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti baik berkaitan dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, jumlahnya, jenisnya dan keandalannya (manfaat yang didapatkan), beserta harganya. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana madrasah harus diawali dengan analisis jenis pengalaman pendidikan yang diprogramkan di madrasah. Analisis tersebut adalah

sebagai berikut:⁹

1. Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan madrasah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginventarisasi kekuarangan perlengkapan madrasah
2. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan madrasah untuk periode tertentu, misalnya untuk satu triwulan atau satu ajaran
3. Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya
4. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran madrasah yang tersedia. Dalam hal ini, jika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan yang diperlukan, maka perlu diadakan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang diperlukan. Semua perlengkapan yang urgen didaftar dan didahulukan pengadaannya
5. Memadukan rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia. Dengan demikian perlu diadakan seleksi lagi dengan melihat skala prioritas
6. Penetapan rencana pengadaan akhir

Salahsatu usaha meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Langkah pertama dalam penyediaan sarana pendidikan adalah mengadakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses pembelajaran
2. Mengikuti pedoman jenis, sifat, kualitas dan kuantitas sarana
3. Mengadakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan plafon anggaran dan memperhatikan skala prioritas
4. Merencanakan sarana pendidikan sesuai dengan kurikulum yang telah disusun

⁹H.A. Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015), 217

5. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan memperhatikan perkembangan teknologi tepat guna.

Aapun langkah-langkah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan itu meliputi, 1). Menganalisis kebutuhan sarana pendidikan yang sesuai dengan kurikulum yang telah disusun sebelumnya 2). Apabila kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan melebihi daya beli madrasah atau daya pembuatan, maka harus diadakan seleksi menurut skala prioritas 3). Mengadakan inventarisasi terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki 4). Mencari data, dalam tahap ini menentukan dana dari mana yang harus dipaakai untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan 5). menunjuk orang yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengadaan sarana pendidikan

Setelah rencana pengadaan sarana dan prasarana dibuat, langkah selanjutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana madrasah biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan program madrasah, menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan madrasah yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana berfungsi untuk menyediakan kebutuhan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan prosedur yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan melalui pembelian, hadiah atau sumbangan, tukar menukar dengan kerjasama pengelola sarana prasarana lainnya, dan meminjam. Dengan pengadaann

tersebut diharapkan dapat menjaga tingkat persediaan barang setiap tahu anggaran mendatang. Berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah, ada tiga hal yang perlu dipahami. Pertama, bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah harus melalui perencanaan. Kedua, bahwa banyak cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah. Ketiga, bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga semua penggunaan uang yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah itu dapat dipertanggung jawabkan baik kepada pemerintah, yayasan madrasah, maupun ke masyarakat.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang ditujukan agar sarana dan prasarana yang ada selalu terjaga kondisinya dan senantiasa siap digunakan setiap saat guna menunjang pembelajaran. Pemeliharaan dilakukan dengan berbagai cara sesuai kondisi barang antara lain dengan pengecekan, pencegahan, dan pemeliharaan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik dan siap digunakan. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud. Adapun tujuan pemeliharaan 1). Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari alat tersebut 2). Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan, sehingga diperoleh hasil yang optimal 3). Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur 4). Untuk menjamin keselamatan orang atau peserta didik yang menggunakan alat tersebut

Adapun manfaat dari pemeliharaan sarana dan prasarana itu meliputi 1). Jika peralatan terpelihara dengan baik, umumnya akan awet yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu dekat 2). Pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan

seminimal mungkin 3). dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga terhindar dari kehilangan 4). Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan enak dilihat dan dipandang 5). Pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik pula

Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan seluruh aset yang dimiliki sekolah agar terkontrol dan terawasi secara rinci sehingga memudahkan untuk kebutuhan seperti pelaporan sarana dan prasarana madrasah. Barang inventaris madrasah adalah semua barang milik yayasan, dan atau Negara (yang dikuasai madrasah) baik yang diadakan/dibeli melalui dana pemerintah, maupun diperoleh sebagai pertukaran, hadiah atau hibah serta hasil usaha pembuatan sendiri madrasah guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Tiap madrasah wajib menyelenggarakan inventarisasi barang milik Negara yang dikuasai/diurus oleh madrasah masing-masing secara teratur, tertib dan lengkap. Kepala madrasah melakukan dan bertanggung jawab atas terlaksananya inventarisasi fisik dan pengisian daftar inventaris barang milik Negara yang ada di madrasah.

Inventarisasi ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik Negara (atau swasta). Inventarisasi juga memberikan masukan yang sangat berharga bagi efektifitas pengelolaan sarana dan prasarana. Inventarisasi dilakukan terhadap barang-barang yang tidak habis dipakai, yang bagi madrasah negeri terdiri dari barang-barang milik Negara. Barang-barang tersebut dibeli atau diadakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik seluruhnya atau sebagian. Inventarisasi harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari pemerintah, termasuk juga yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selama proses pemanfaatan atau pun inventarisasi kadang-kadang ditemukan barang-barang atau perlengkapan madrasah yang rusak berat. Barang-barang itu tidak dapat digunakan dan tidak dapat pula diperbaiki lagi. Seandainya diperbaiki pun, perbaikannya akan menelan biaya yang besar sehingga lebih baik

membeli yang baru dari pada memperbaikinya. Demikian pula, melakukan inventarisasi perlengkapan, kemungkinan juga ditemukan beberapa perlengkapan pendidikan yang jumlahnya berlebihan sehingga tidak digunakan lagi, dan barang-barang yang kuno yang tidak sesuai dengan situasi. Apabila semua perlengkapan tersebut tetap dibiarkan atau disimpan, antara biaya pemeliharaan dan kegunaannya secara teknis dan ekonomis tidak seimbang. Oleh karena itu, terhadap semua barang atau perlengkapan tersebut perlu dilakukan penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan proses yang terakhir dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan di madrasah, oleh karena itu harus dipertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya.

Penghapusan adalah kegiatan yang bertujuan menghilangkan sarana dan prasarana yang dianggap tidak memiliki fungsi sesuai dengan yang diharapkan lagi dari daftar inventaris dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Barang yang dilakukan penghapusan harus memenuhi syarat tertentu yang digunakan sebagai standar untuk menentukan suatu barang memang perlu dihapus dari daftar inventaris. Penghapusan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan lelang dan pemusnahan.

Penghapusan sarana dan prasarana juga merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat diertanggungjawabkan. Secara definitif, penghapusan sarana dan prasarana dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini. Imron dan Bafadal menyatakan bahwa penghapusan perlengkapan adalah kegiatan meniadakan kegiatan barang-barang milik lembaga (bisa juga sebagai milik Negara) dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰. Menurut Barnawi dan Arifin, maupun Minarti menyatakan bahwa penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan/menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana yang bersangkutan sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan

¹⁰Ahmad Nurabadi, *Manajemen sarana dan Prasarana Pendidikan*, (Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, 2014), 77

pembelajaran di sekolah¹¹. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghapusan sarana dan prasarana adalah suatu aktivitas manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang bermaksud untuk meniadakan, mengeluarkan dan/atau menghilangkan sarana prasarana dari daftar inventaris mengingat ketidak berfungsian sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di smadrasah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.¹³

2. Jenis dan Sumber Data

Yang di maksud sumber data dalam penelitian, menurut Arikunto adalah subjek di mana data diperoleh.¹⁴ Data adalah segala fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.¹⁵ Sumber data dalam penelitian

¹¹Ahmad Nurabadi, *Manajemen sarana dan Prasarana Pendidikan*, (Malang, Fakultas ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, 2014), 77

¹²Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 4.

¹³Nana Syaodih Sumadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Kerjasama Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Dengan Remaja Rosda Karya, 2005), 72.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan praktik* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2009), 75.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan praktik* (Jakarta:Rhineka Cipta, 2009), 161.

adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁶ Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.¹⁷

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai kuesioner merupakan contoh dari data primer. Menurut Nasution sumber dari primer adalah “data yang langsung diperoleh sumbernya”.¹⁸

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder juga dapat diartikan data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan tertulis atau kepustakaan, yakni buku-buku, arsip, artikel, jurnal ilmiah, ensiklopedi dan terbitan ilmiah yang membahas masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

1. Observasi (pengamatan)
2. Interview (wawancara)
3. Dokumentasi.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan praktik* (Jakarta:Rhineka Cipta, 2009), 129

¹⁷Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2012), 157.

¹⁸Nasution, *Metode Research*, (Jakarta Bumi Aksara, 2001), 143